

5. Barang tambang (hasil laut)
6. Rikaz (harta terpendam). (Hasbi Ash Shiddie -
qy : 1984 : 30)

Harta benda yang dikeluarkan untuk zakat, harus yang mempunyai nilai sama dengan benda yang dizakati. Misalnya padi, zakatnya juga harus padi/beras, padi putih tidak boleh dikeluarkan zakatnya pada padi yang merah. (M. Rifa'i, 1988, : 362)

Mengenai pelaksanaan zakat mal ini melihat macam hartanya yang akan dizakati (dikeluarkan) zakatnya:

1. Apabila hartanya sudah sampai senisab, tetapi belum sampai satu tahun, maka pada saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya.
2. Mengenai harta yang sudah sampai satu tahun maka zakatnya dibayar pada akhir tahun perhitungan.
3. Untuk hasil pertanian dan buah-buahan dibayar setiap kali panen apabila sudah mencapai satu nisab. Apabila pengairannya dari air hujan, maka zakatnya 20%, tetapi apabila disiram dengan tenaga manusia, maka zakatnya 10%.
4. Penyerahan zat mal ini biasanya langsung di-

Dengan demikian bahwa pada wajib zakat emas dan perak apabila sudah mencapai satu nisab, yaitu 80 gram untuk emas dan 560 gram untuk perak, sedangkan ketentuannya adalah 2,5%.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus 1 mitskal = 4 gram, 20 mitskal = 20×4 gram = 80 gram, maka zakatnya $\frac{1}{40} \times 80 = 2$ (dua) gram emas.

Sedangkan masalah zakat perak menurut Prof. H. Mahmud Yunus, yaitu 1 dirham = 2,8 gram, $200 \times 2,8$ gram = 560 gram = Rp. 56, maka zakatnya $\frac{1}{2} \times 560 = 14$ gram perak.

Sedangkan untuk memudahkan perhitungan nisab emas dan zakatnya secara terinci adalah sebagai berikut:

menjadi dasar bahwa segala macam jenis barang yang diperdagangkan wajib dizakati.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat untuk bisnis dalam berbagai macam barang tersebut.
- b. Nilai barang-barang yang diperdagangkan itu telah mencapai satu nisab pada akhir tahun dagangan itu.
- c. Nisab yang menjadi patokan di dalam barang-barang dagangan adalah emas dan perak.

Apabila jumlah harga barang itu telah cukup senisab, maka dikeluarkanlah zakatnya: $\frac{1}{40}$ (2,5 %) dari harga seluruhnya yang merupakan modal dan segala keuntungannya. Barang-barang inventaris tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena yang dimaksud barang dagangan pada kenyataannya adalah barang-barang yang silih berganti dan dapat ditukar-tukar, karena diperkirakan akan mendapat keuntungan.

Perhitungan harga barang dagangan harus disesuaikan dengan nilai mata uang negeri tempat usaha dan menurut nilai uang pada akhir tahun perhitungan.

- f. Semua pemiliknya tergolong orang yang memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat (sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini).
(Al Ghazali, 1991 : 51)

5. Zakat Hasil Tambang (Laut)

Zakat hasil tambang seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara dan sebagainya, apabila telah mencapai nisabnya maka pada waktu itu juga wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%.

Nisab hasil tambang ialah 200 dirham untuk perak murni, dan 93,6 dirham untuk emas murni. Adapun barang tambang selain itu, seperti minyak gas atau batu bara, maka ia diukur dengan ukuran emas atau perak seperti di atas. Jadi kalau hasil tambang minyak telah mencapai sejumlah 93,6 gram emas murni, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. (M. Tholib, 1989 : 144)

Sedangkan dalam ilmu fiqh, harta dari hasil tambang itu disebut dengan ma'din dan rikaz.

- Ma'din yaitu semua yang berasal dari perut bumi yang berharga dan mempunyai manfaat yang besar, seperti emas, perak, timah, besi.

- Rikaz yaitu adakala simpanan purbakala, sedangkan menurut ulama' Irak sama dengan ma'din. (Jamaludin Ahmad Al Buny, 1983 : 136).

Yang menjadi persoalan adalah barang tambang, apakah itu termasuk ma'din atau rikaz. Apabila memahami istilah ma'din, maka jadilah hasil hasil tambang seluruhnya.

Ma'din adalah harta yang dikeluarkan dari laut, darat tetapi pada umumnya hasil tambang yang meliputi timah, emas, perak, minyak gas, batu bara dan biji besi. Nisab dari tambang ini tidak ditetapkan, demikian pula waktu pemungutannya tidak ditentukan waktu haul, kadar zakatnya 1/5 di saat tambang itu dikeluarkan dari hasil bumi yang murni dan telah digunakan.

Tentang zakat pertambangan itu ada tiga hal:

- a. Harta tambang itu langsung berhubungan dengan amar atau perintah semua benda yang ada di bumi harus diambil zakatnya.
- b. Kekhususan benda-benda tambang itu dipandang dari segi asal kejadiannya, adalah milik masyarakat sebagai sumber alam dan sebagai karnia Allah yang diberikan kepada

- b. Jika ditemukan di tempat yang tidak terjaga, seperti bekas perkampungan, atau pada puing-puing rumah orang Jahiliyah, atau bekas rumah orang non muslim maka barang galian itu langsung dimiliki orang yang menemukannya.
- c. Barang galian atau rikaz, wajib dikeluarkan zakatnya yaitu $1/5$ (20%) setelah dibersihkan dari kotorannya, dan tidak disyaratkan nisab dan haul.

C. Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Memandang bahwa masalah zakat sebagai urusan pribadi, jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman nabi, khulafaur-raisidin, dan pemerintah Islam sesudahnya, semula zakat ditangani oleh pemerintah yang disebut amil zakat yang bertugas menarik dan mengumpulkan dari para wajib zakat dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz ke negeri Yaman atas perintah nabi Muhammad untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahiqqin. (Masyfu' Zuhdi, 1988 : 190)

sahabat sebagaimana akan datang nanti, maka jadilah pemilik harta seolah-olah wakil dari penguasa, walaupun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak si imam dalam mengambil zakat. Mengenai harta perdagangan berdasarkan tempatnya termasuk harta bathin. (M. Yusuf Qardawy, 1987 : 745)

Di samping adanya amil zakat, ada juga lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu Baitul Mal. Sedang baitul mal itu sendiri ada empat macam, yaitu:

1. Baitul Mal yang khusus mengelola zakat.
2. Baitul Mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim.
3. Baitul Mal yang khusus mengelola rampasan perang dan rikaz. Dalam hal ini para ulama' berpendapat bahwa barang temuan itu tidak jatuh pada tangan penemunya, tetapi dikuasai oleh negara.
4. Baitul Mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.

Maka dari itu zakat tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa

campur tangan dari pemerintah, maka bisa timbul hal hal yang negatif, antara lain sebagai berikut:

1. Muzakki (para wajib zakat) yang belum mantap dalam kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistik yang berlebihan, serta perasaan egoistis yang berlebihan pula, tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangan melalui zakat.
2. Fakir miskin dan mustahiqqin lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat (tidak merasa malu atau tersinggung perasaannya), apabila menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari para wajib zakat.
3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiqqin, apalagi kepada delapan asnaf atau yang berhak menerimanya, tidak efisien, dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran-sasaran tujuan utama dari zakat.
4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap dan potensial yang dapat dipakai untuk pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang materiil maupun spirituil. Dan sumber dana

si Islam tentang kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebab di samping zakat mal, Islam juga mengajarkan pelaksanaan wajib infaq, shadaqah dan wakaf, dan lembaga baitul mal sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Bahkan seperangkat konsepsi Islam mengenai nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan sosial secara luas juga terdapat dalam etika kepemimpinan secara susatnsi hukum pidana dan hukum perdata.

Mengenai konsep zakat mal dalam konteks dan paradigma mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan, serta keadilan, dengan melihat tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip kunci, yaitu:

1. Zakat mal sebagai prinsip Islam, pada dasarnya sudah bersifat matang dan konkrit. Artinya siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang harus menerimanya, dan berapa persentase yang harus dikeluarkan bagi para wajib zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal, Islam sudah menetapkan regulasi yang baku.
2. Zakat mal dalam paradigma Islam merupakan suatu transformasi material yang wajib ditarik pemerintah dari mereka yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat bila yang bersangkutan eng-

gan untuk mengeluarkannya.

3. Zakat mal tidak bisa dipisahkan dari aspek pajak. Jadi menurut Islam pajak pada dasarnya kewajiban sosial bagi individu sebagaimana zakat. (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Jatim : 1990 : 26).

Dalam hal ini Islam tidak membenarkan adanya pembebanan ganda antara zakat dan pajak bagi kaum muslimin. Islam menetapkan perangkat regulasi dan ketentuan demikian karena Islam tidak mau membebani umatnya secara ekonomis. Jadi pembayaran atau pengeluaran zakat semestinya dijadikan satu dengan pajak yang secara keseluruhan kewajiban mengeluarkan aset material tersebut merupakan sosial yang harus dilaksanakan kaum muslimin.

Ketiga prinsip tentang zakat mal tersebut di atas harus dikembangkan seluas-luasnya. Hal ini karena sebagaimana Islam mengkonsepsikannya, membayar zakat bagi para muzakki merupakan suatu proses untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Jatim, 1990 : 27)